



KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GATAK
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG KESEHATAN



Nomor : ~~299~~ /A/O10/I/2024..

Nomor : 900/105.1/I/2024

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Wartini, S.K.M., M.Sc** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) yang berkedudukan di Jln. Letjend S. Humardani No. 1 Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Dr Siti Sulastijah, M.P.H** : Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gatak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLUD Puskesmas Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. RT 02/rw 08 , Blimbing, Gatak Sukoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo;
3. bahwa dalam Kesepakatan Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi termasuk didalamnya kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;;
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Veteran Bangun Nusantara Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tentang Penyelenggaraan Laboratorium, Praktek Belajar Lapangan/ Praktik Kerja Iptangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Kesehatan Nomor : 007/MoU/FKMIK/Univet.Btr/I/2023 dan Nomor : 445/ 444/I/2023

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Kesepakatan Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD & TUJUAN
Pasal 1

Maksud diadakan Kesepakatan kerjasama ini adalah:

1. Kesepakatan kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, clinical intruktur, subjek penelitian, peserta didik, peneliti, penyelenggara pelayanan kesehatan, serta Institusi Pendidikan.
3. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gatak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan diadakan kesepakatan kerjasama adalah:

1. Terselenggaranya pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gatak
2. Meningkatnya mutu pelayanan kepada pasien.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gatak

BAB II
OBJEK
Pasal 3

Objek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gatak

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

1. Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan program studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
2. Lingkup kegiatan kerjasama ini adalah :
 - a. Pendidikan, meliputi Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Belajar Lapangan (PBL) Residensi
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama meliputi:

- (1) Praktik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Puskesmas Gatak sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

BAB V
HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK wajib menaati peraturan yang ada pada masing-masing pihak;
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh masing – masing pihak atas seijin pemilik fasilitas sarana prasarana;
- (3) PARA PIHAK berhak untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak demi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat;
- (4) PARA PIHAK berhak memberikan bimbingan, pengarahan, atau masukan pada kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (5) PARA PIHAK diharapkan memanfaatkan hasil kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang telah dilakukan agar berkelanjutan dan dapat memberikan impact bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pemanfaatan lahan praktik antara lain:
 - a. Pelaksanaan Pendidikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Praktik Belajar Lapangan
 - Profesi Rp 50.000.-
 - D4/S1 Rp 40.000.-
 - D3 Rp 30.000.-
 - b. Studi pendahuluan

- D4/S1 Rp 100.000.-
 - D3 Rp100.000.-
 - c. Penelitian
 - D4/S1 Rp 200.000.-
 - D3 Rp150.000.-
 - d. Studi Pendahuluan & Penelitian
 - D4/S1 Rp 250.000.-
 - D3 Rp 200.000.-
 - e. Uji Validitas dan Reliabilitas semua jenjang pendidikan Rp 50.000.-
- (2) Biaya pada ayat (1) diluar pada praktik PKL diluar honorarium pembimbing klinik
 - (3) Pembiayaan pada kegiatan PKL untuk setiap peserta didik dalam satu minggu
 - (4) Pembiayaan penelitian untuk satu periode penelitian
 - (5) Pembiayaan lain diluar ayat (1) diatur sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi suatu perselisihan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo.

BAB IX
KEADAAN KAHAR
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, banjir, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan / kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus

memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerja sama ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

- (4) Apabila Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.
- (5) Apabila Pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan jawabannya kepada Pihak yang terkena keadaan memaksa tersebut, maka penundaan / penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

BAB X
PENUTUP
PASAL 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dibuat dalam

rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Dan Ilmu Kesehatan Universitas
Veteran Bangun Nusantara



Wartini, S.K.M., M.Sc.

NIPy. 19830923 201312 2 183

PIHAK KEDUA

Kepala BLUD Puskesmas Gatak
Kabupaten Sukoharjo



Dr Siti Sulastika, M.P.H

Kepala Puskesmas